UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TUGAS AKHIR

PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KOTA DUMAI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:
NISHA WULANDARI
01970623400

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA	:	NISHA WULANDARI
NIM	:	01970623400
JURUSAN	:	D3. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER	:	VI (ENAM)
JUDUL	:	PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KOTA DUMAI

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Ari Nur Wahidah, SE,MM
NIP.19780105 200710 2 002

UIN SUSKA RIAU

MENGETAHUI

DEKAN	KETUA PRODI
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM	**Dr. Jhon Afrizal,S.HI, M.A**
NIP:19700826 199903 2 001	**NIP:19790911 201101 1 003**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NISHA WULANDARI

NIM : 01970623413

PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

SEMESTER : VI (ENAM)

JUDUL : PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KOTA DUMAI

TANGGAL UJIAN : 2 AGUSTUS 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr.Hj.Julina, SE, M. Si
NIP : 19730722 199903 2001

Sekretaris
Fatimah Zuhra, S. SI,M.Stat
NIP : 19880718 202012 2018

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.SI
NIP : 19791127 200801 2010

Penguji II
Afdiana Ilosa, S.AP, MPA
NIP : 19870716 201503 2 003

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nisha wulandari
NIM : 01970623400
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai , 06 April 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) di SAMSAT KOTA DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 665B4AJX855795477

Nisha Wulandari
NIM : 01970623400

pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KOTA DUMAI

OLEH
NISHA WULANDARI
01970623400

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai pada tanggal 23 Maret sampai 24 April 2022. Penulisan ini menjelaskan tentang Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Daerah khususnya penerimaan PKB dan BBNKB berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah, karena setiap tahun terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap penggunanya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan faktor - faktor yang mempengaruhi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Prosedur BBNKB dimulai dari wajib pajak datang ke kantor samsat dengan membawa persyaratan, setelah itu wajib pajak mengisi formulir pendaftaran sembari menunggu petugas untuk melakukan cek fisik kendaraan bermotor, kemudian wajib pajak melakukan pendaftaran ke loket BBNKB dengan menyerahkan persyaratan. Lalu kendaraan akan di cek ulang kepemilikan di loket progresif. Kemudian wajib pajak mengambil STNK/ SKPD di loket pengesahan dan penyerahan STNK dan SKPD. Faktor yang mempengaruhi nya yaitu, faktor pendukung nya tersedia nya fasilitas dan sarana, faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap BBNKB, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan BBNKB.

Kata kunci: BBNKB, wajib pajak, prosedur BBNKB, Faktor yang mempengaruhi pemunguta

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACK

PROCEDURE FOR COLLECTING DUTY ON NAME OF MOTOR VEHICLES (BBNKB) AT DUMAI CITY SAMSAT OFFICE

NISHA WULANDARI
01970623400

This research was carried out at the Dumai City Revenue Management UPT Office from March 23 to April 24, 2022. This paper describes the Procedure for Transferring Motor Vehicles (BBNKB). Regional taxes, especially PKB and BBNKB revenues, play an important role in the growth of regional revenues, because every year there is a very rapid increase in users. The purpose of this paper is to find out what the Procedure for the Transfer of Names for Motorized Vehicles is and the factors that influence it. This writing uses qualitative methods with data collection through interviews and documentation. The BBNKB procedure starts with the taxpayer coming to the Samsat office with the requirements, after that the taxpayer fills out the registration form while waiting for the officer to do a physical check of the motor vehicle, then the taxpayer registers at the BBNKB counter by submitting the requirements. Then the vehicle will be rechecked for ownership at the progressive counter. Then the taxpayer takes the STNK / SKPD at the validation counter and submits the STNK and SKPD. The factors that influence it are, the supporting factors are the availability of facilities and infrastructure, the inhibiting factor is the lack of public knowledge about taxes and the lack of public awareness.

Keywords: BBNKB, taxpayers, BBNKB procedures, Factors influencing collection

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **"PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT KOTA DUMAI".** Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa sallam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan selesaikan dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Khususnya kepada orangtua tersayang ayahanda saya yang bernama Muhammad Nawaf dan Novanto Prayitno beserta ibunda saya tercinta Suji Hartini karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung, penulis dalam keadaan apapun termasuk mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta serta menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Dalam penyelesaian TA ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan

dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sektretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Ibu Ari Nur Wahidah, SE, MM sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkang waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
7. Seluruh Staf Jurusan D3 Administrasi Perpajakan serta staff akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali atas bantuan yang tiada henti bagi penulis selama ini.
8. Seluruh Pegawai di Kantor UPT kota Dumai yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada keluarga besar om, tante,sepupu, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Untuk teman - teman seperjuangan Angkatan 2019 terutama kelas A Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perpajakan, terimakasih atas pengalaman, kebersamaannya.
12. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis di balas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang diinginkan oleh para pembaca. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juni 2022
Penulis,

NISHA WULANDARI
01970623400

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

Persetujuan

Pengesahan

Pernyataan

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 9

1.3.Tujuan Penelitian 9

1.4. Manfaat Penelitian 10

1.5.Metode Penelitian 10

1.6.Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah singkat Kantor UPT Dumai 14

2.2. Struktur Organisasi Instansi 16

2.3. Uraian Tugas Kantor UPT Dumai 18

2.4. Visi dan Misi kantor UPT Dumai 21

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1. Tinjauan Teori 23

3.1.1. Pengertian Pajak 23

3.1.2. Fungsi Pajak 23

3.1.3. Teori-Teori yang mendukung pemumutan Pajak 25

3.1.4. Syarat Pemumutan Pajak 26

3.1.5. Sistem Pemumutan Pajak 27

3.1.6. Jenis Pajak 28

3.1.7. Asas Pemungutan Pajak 30

3.1.8. Pengertian Pajak Daerah 31

3.1.9. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 31

3.1.10. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 32

3.1.11. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor 33

3.1.12. Pengertian Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 33

3.1.13. Persyaratan Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang harus dipenuhi 34

3.1.14. Mekanisme dan Prosedur Bea Balik Nama 35

3.1.15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 35

3.1.16. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 36

3.1.17. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor 36

3.1.18. Jenis Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)37

3.1.19. Biaya atau tarif PKB 37

3.1.20. Tarif dan biaya BBNKB 38

3.1.21. Pajak menurut islam 39

3.2.Tinjauan Praktek 42

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1 Skema Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 42

3.2.2 Jumlah kendaraan yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 44

3.2.3 Upaya yang dilakukan kantor UPT Kota Dumai dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam taat perpajakan 45

3.2.4 Hambatan yang ditemui di Kantor UPT Kota Dumai dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 46

3.2.5 Perbandingan tinjauan teori dan praktek 48

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 49

4.2 Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai 16

Gambar 3.2 Skema prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Kota Dumai 42

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penerimaan pajak BBNKB 1 di Kantor Samsat Kota Dumai Tahun 2019-2021 6

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB II di Kantor Samsat Kota Dumai 2019-2021 7

Tabel 1.3 Target dan realisasi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai 8

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 44

Tabel 3.2 Perbandingan teori dan praktek pada Kantor Samsat Kota Dumai ..... .48

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

P ENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya beraneka ragam, lautan,dan sumber daya alam yang melimpah. Perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sector untuk meningkatkan pendapatan atau kas negara untuk membiayai pembangunan. Untuk melakukan perubahan tersebut maka di perlukannya dana yang sangat besar dan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dan sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Maka dari itu peranan pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran negara. Pemberian sebagian harta kekayaan rakyat secara wajib kepada negara tanpa kontraprestasi tidak disebut perampokan atau perampasan harta kekayaan rakyat oleh negara, hal ini karena rakyat dianggap sudah menyetujui penarikan pajak itu sendiri. Tujuan dituangkannya kebijaksanaan perpajakan itu kedalam bentuk Undang- Undang adalah agar mengikat semua orang untuk mematuhinya dan tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang menganut asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Menurut The Liang Gie (1986: 45) yan dimaksud asas " Dekonsentrasi" adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat atau instansi tingkat atas kepada pejabat yang di daerah, sedangkan "Desentralisasi" pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan organisasi untuk menyelenggarakan kepentingan setempat atau penduduk yang berada di suatu wilayah satu-satuan organisasi pemerintahan, yang disebut "wilayah otonom".

Pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Tertib Cara perpajakan pada pasa 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,2018).

Pengenaan pajak yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat ada dasar pengaturannya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui dan melaksanakan kewajibannya. Untuk pajak sendiri , dasar pengaturannya ada pada UUD 1945 (termasuk UUD 1945 hasil amandemen), undang- undang, keputusan Menteri keuangan sampai dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat edaran (SE) Dirjen Pajak dan sejenisnya.

Dasar hukum tertinggi pemungutan pajak ada pada UUD 1945. Berdasarkan isi dari UUD 1945 tersebut dapat diambil kesimpulan semua pemungutan pajak periode dari tahun 1945 sampai dengan sekarang masih berlaku UUD 1945 tersebut (atau sampai dengan batas dikeluarkannuya UUD 1945 hasil amandemen) pemungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dalam pembangunan suatu daerah yang dikarenakan pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berdasarkan pengertian Undang - undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang di pungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat alat berat dan alat- alat besar yang tidak digunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan umum.

Pajak kendaraan bermotor sangat berperan penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada saat sekarang, tiap daerah yang ada di Indonesia diharapkan agar dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan di daerahnya masing- masing agar tidak ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 pasal 14 tentang Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor baik umum maupun bukan umum. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor baik umum maupun bukan umum.

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor baru disebut BBNKB I, sedangkan untuk kendaraan bekas disebut BBNKB II, BBNKB III, dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 2Prp.Tahun 1965, maka tarif BBNKB tersebut dinaikkan menjadi 20% untuk BBNKB II,III, dan seterusnya.

Dalam peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 7055/BUPP tanggal 13 januari 1960 diberikan kriteria tentang mobil mewah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968, maka BBNKB diserahkan kepada daerah. Jadi sejak tahun 1968 BBNKB merupakan pajak daerah tingkat I.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini berkembang pesat, dapat dilihat berdasarkan data dari Kantor Samsat Kota Dumai yang menunjukkan jumlah unit kendaran bermotor yang melakukan BBNKB sejak tahun 2019-2021 sebanyak 29.331 unit kendaraan bermotor. Seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut didukung pula dengan berbagai kemudahan yang diberikan dealer dalam pembelian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya dan selera yang berubah-ubah seiring bergantinya zaman akan mengakibatkan mudahnya terjadi perpindahan kepemilikan suatu kendaraan bermotor dan memicu kepada pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta kurangnya tingkat pengetahuan tentang peraturan dan banyak yang beranggapan bahwa prosedur dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang rumit dan memerlukan waktu lama. Sehubungan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hal tersebut.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalamhal mengurusi surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraanbermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggrisone roof system adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untukmemperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yangkegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Berdasarkan yang Penulis peroleh dari Kantor Samsat Kota Dumai bahwasannya jumlah target dan realisasi pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB 1 di Kota Dumai
Tahun 2019- 2021

No	Tahun	Jenis Kendaraan	Unit	Realisasi
1	2019	Sepeda Motor	7611	Rp. 11.494.990.000
2	2020	Sepeda Motor	5770	Rp. 8.424.030.000
3	2021	Sepeda Motor	8487	Rp. 12. 639.572.000

Sumber Kantor UPT Kota Dumai Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah BBNKB I di Kantor UPT kota Dumai pada tahun 2019 sepeda motor sejumlah 7611 dan terealisasi sebesar Rp. 11.494.990.000, pada tahun 2020 jumlah BBNKB I jenis kendaraan sepeda motor sejumlah 5770 dan terealisasi sebesar Rp. 8.424.030.000, dan pada tahun 2021 jumlah BBNKB I jenis kendaraan sepeda motor sejumlah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8487 dan terealisasi sebesar Rp. 12.639.572.000.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Samsat Kota Dumai bahwasannya untuk penerimaan pajak BBNKB II pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB II di Kota Dumai
Tahun 2019-2021

NO	Jenis Kendaraan	2019		2020		2021	
		Unit	Realisasi	Unit	Realisasi	Unit	Realisasi
1.	Sedan	28	Rp. 24.755.000	37	Rp. 39.389.250	31	Rp. 32.081.500
2	Jeep	67	Rp. 119.750.500	115	Rp. 246.548.500	101	Rp. 258.416.500
3	Minibus	541	Rp. 635.830.100	681	Rp. 659.658.325	622	Rp. 797.098.860
4	Bus	0	-	1	Rp. 955.000	2	Rp. 849.000
5	Microbus	4	Rp. 3.886.500	6	Rp. 5.564.000	5	Rp. 7.346.000
6	Pick Up	105	Rp. 112.388.000	105	Rp. 94.645.000	90	Rp. 115.741.500
7	Truck	86	Rp. 158.232.000	83	Rp. 130.502.250	119	Rp. 237.473.500
8	Sepeda Motor	1578	Rp. 187.602.000	1705	Rp. 163.556.500	1351	Rp. 170.210.500
	Total	2409	Rp. 1.242.444.100	2733	Rp. 1.340.818.825	2.321	Rp. 1.619.217.360

Sumber Kantor UPT Kota Dumai Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pajak BBNKB II di Kantor UPT Kota Dumai pada tahun 2019 jenis kendaraan sedan unit sejumlah 28 dan terealisasi sebesar Rp. 24.755.000, jeep unit sejumlah 67 dan terealisasi sebesar Rp.119.750.500, minibus unit sejumlah 541 terealisasi Rp. 635.830.100, bus unit dan terealisasi nya 0, microbus unit sejumlah 4 dan terealisasi Rp. 3.886.500, pick up unit sejumlah 105 dan terealisasi Rp.112.388.000, truck unit sejumlah 86 dan terealisasi Rp. 158.232.000, sepeda motor unit sejumlah 1578 dan terealisasi sebesar Rp. 187.602.000.

Pada tahun 2020 jumlah pajak BBNKB II di Kantor UPT Kota Dumai jenis kendaraan sedan unit sejumlah 37 dan terealisasi sebesar Rp. 39.389.250, jeep unit sejumlah 67 dan terealisasi sebesar Rp. 246.548.500,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minibus unit sejumlah 541 dan terealisasi sebesar Rp. 659.658.325, bus unit sejumlah 1 dan terealisasi Rp. 955.000, microbus unit sejumlah 6 dan terealisasi Rp. 5.564.000, pick up unit sejumlah 105 dan terealisasi sebesar Rp. 94.645.000, truck unit sejumlah 83 dan terealisasi Rp. 130.502.250, sepeda motor unit sejumlah 1351 dan terealisasi Rp. 170.210.500.

Pada tahun 2021 jumlah pajak BBNKB II di Kantor UPT Kota Dumai jenis kendaraan sedan sejumlah 31 dan terealisasi sebesar Rp. 32.081.500, jeep unit sejumlah 101 dan terealisasi Rp. 258.416.500, minibus unit sejumlah 622 dan terealisasi Rp. 797.098.860, bus unit sejumlah 2 dan terealisasi sebesar Rp. 849.000, microbus unit sejumlah 5 dan terealisasi Rp. 7.346.000, pick up unit sejumlah 90 dan terealisasi sebesar Rp. 115.741.500, truck unit sejumlah 119 dan terealisasi sebesar RP. 237.473.500, sepeda motor unit sejumlah 1351 dan terealisasi sebesar Rp. 170.210.500.

Berdasarkan yang Penulis peroleh dari Kantor Samsat Kota Dumai bahwasannya jumlah target dan realisasi pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Dumai Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	Rp. 14.774.709.745,31	Rp. 12.737.434.100
2	2022	Rp. 12.398.816.663,36	Rp. 9.764.848.825
3	2021	Rp. 12.665.969.220	Rp. 14.258.789.360

Sumber: Kantor UPT kota Dumai Tahun 2019-2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019,2020,2021 target penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kantor UPT Kota Dumai mengalami kenaikan dan penurunan , begitu juga dengan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami kenaikan dan penurunan. Pada table diatas di jelaskan bahwa pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 12.737.434.100 dari target 14.774.709.745,31 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan Rp. 9.764.848.825 dari target Rp. 12.398.816.663,36, Pada tahun 2021 mengalami kenaikan Rp 14.258.789.360 dari target Rp. 12.665.969.220

Dari uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian kasus dan permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka dari itu penulis mengambil tugas akhir dengan judul "**PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT KOTA DUMAI".**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai?

1.3.Tujuan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan juga untuk menerapkan teori – teori yang penulis telah dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun pihak – pihak yang berkepentingan, dan terkhusus bagi Kantor UPT pengelolaan pendapatan Kota Dumai dalam meningkatkan pelayanannya melalui Kantor Samsat Kota Dumai, serta sosialisasi terhadap masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Analisis Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor UPT kota Dumai jalan Sultan Syarif Kasim, Bintan, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Riau 28826

1.5.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak khususnya masyarakat yang akan melakukan pengurusan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sedangkan objek penelitian ini adalah Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai.

1.5.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan maret sampai dengan bulan April 2022

1.5.5. Sumber Data dan jenis data

a. Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak kantor UPT khususnya kasi penerimaan pajak di Kantor Samsat Kota Dumai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, data yang di peroleh dalam bentuk laporan,catatan, dokumen melalui kantor UPT dan berbagai sumber.

1.5.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode Wawancara Metode wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada karyawan atau staf kantor UPT kota Dumai, khusus nya kepada bagian Kasi Penerimaan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan relevan.

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data yang diporel dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR UPT KOTA DUMAI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bab ini berisikan penjelasan tentang sejarah singkat kantor UPT kota Dumai, struktur organisasi instansi , uraian tugas kantor UPT kota Dumai, visi dan misi Kantor UPT Dumai.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pengertian pajak, teori yang mendukung pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, jenis pajak, asas pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jenis-jenis Kendaraan Bermotor, pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), persyaratan BBNKB yang harus dipenuhi, mekanisme dan prosedur BBNKB, objek PKB dan BBNKB, subjek PKB dan BBNKB, jenis warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), biaya atau tarif PKB, biaya atau tarif BBNKB, pajak menurut islam, skema Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tinjauan praktek, upaya yang dilakukan kantor UPT kota Dumai dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam taat perpajakan, hambatan-hambatan yang ditemui di Kantor UPT kota Dumai dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tabel perbandingan teori & praktek pada kantor samsat kota Dumai.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat Kantor UPT Dumai

Dinas pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan suarat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau.

Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah, Maka diTetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang di Sahkan oleh Menteri Dalam Negri dengan Surat Keputusan Nomor : PEM.061.341.2/127 Tanggal 12 April 1980, dengan BerpedomanKepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUP 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Dinas pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 49 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah.

Unit Pelayanan Teknis dan Pos Pelayanan Teknis mempunyai fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan operasional pemungutan pajak
2. Melaksanakan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dikantor Bersama samsat
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor Bersama samsat
6. Menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak daerah
7. Melaksanakan penetapan pajak
8. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
9. Merencanakan penerimaan pajak
10. Melaksanakan tugas- tugas ketatausahaan
11. Menyusun laporan data objek dan penetapan pajak daerah
12. Menerima dan menghimpun tunggakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan
13. Menerima, membukukan, dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Melakukan pengecekan dilapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat
15. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke KPPD
16. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah
17. Melaksanakan pelayanan masyarakat
18. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengurus segala keperluan masyarakat yang berkaitan dengan surat surat kendaraan bermotor dan pemakaian jalan raya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, SAMSAT bekerja sama dengan kepolisian dan Jasa Raharja, dan Pemerintah Provinsi. Konsep pelayanan satu atap ini sesuai dengan PP No. 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu pada pasal 14 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa Sistem Pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu atap. Untuk itu jelas bahwa samsat tidak dapat melepas diri dari kegiat an pelayanan publik.

Maka sama hal nya dengan Samsat Kota Dumai. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Samsat Kota Dumai dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara dalam UU No. 25 Tahun 2009 yaitu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pelayanan publik.Unit Pelayanan Teknis Kota Dumai wajib memberikan performa terbaik untuk mendukung kelancaran proses pemungutan pajak dari masyarakat dalam hal ini disebut wajib pajak.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Pada peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 pasal (4) menyebutkan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan, salah satunya susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai terdiri atas :

a. Kepala UPT
b. Subbagian Tata Usaha
c. Seksi Penerimaan
d. Seksi Penagihan ;dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada peraturan Gubernur Riau pasal (1) UPT dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar
b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja kecil

Pada pasal (2) tersebut juga di jelaskan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan kota Dumai, kelas A. UPT pengelolaan pendapatan Daerah kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah kelas A di bidang pekerjaan umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas, pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan
b. Penyelenggaraan koordinasi fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan
c. Penyelenggaraan pemantauan , evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan
d. Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan Konstruksi
e. Pengadaan dan Pengembangan Peralatan Konstruksi
f. Pelayanan Pengembangan Penggunaan Peralatan Konstruksi
g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsi nya

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai

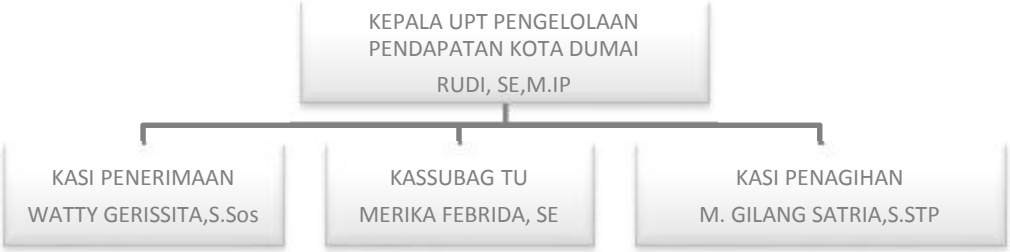

Sumber : Kantor Samsat Kota Dumai Tahun 2022

2.3 Uraian Tugas Kantor UPT Dumai

Dari bagan susunan organisasi UPT/SAMSAT pengelolaan pendapatan kota

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai pada peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Kepala UPT
   a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A
   b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A
   c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan ; dan
   d. Pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
   a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha
   b. Membagi tugas , memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha
   c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur
   d. Mengagendakan dan mendistribusi surat menyurat
   e. Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa jabatan, Analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan

g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi

h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

3. Kepala Seksi Penerimaan

a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan

c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan

d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan

e. Melakukan pengadaan dan pengembangan penggunaan pendapatan

f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan ; dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

i. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan

4. Kepala Seksi Penagihan

a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada seksi penagihan

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memberikan hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan

c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan

d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan

e. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan

f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penagihan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Visi dan Misi Kantor UPT Dumai

a. Visi :

“ Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau Secara Profesional”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi:

Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi badan pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan public secara professional
3. Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelum nya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor UPT Kota Dumai, yaitu:

1. prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yaitu yang pertama wajib pajak datang ke kantor samsat kota dumai untuk melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor yaitu dengan mengecek nomor rangka dan mesin kendaraan bermotor selagi kendaraan bermotor dilakukan pengecekan fisik wajib pajak diberikan formulir persyaratan yang harus di isi oleh wajib pajak, setelah selesai dilakukannya pengecekan fisik dan mengisi formulir maka wajib pajak di sarankan untuk ke loket BBNKB untuk melakukan pendaftaran dan menyerah kan formulir beserta persyaratan bea balik nama kendaraan bermotor. Setelah itu menyerahkan formulir tadi wajib pajak akan di panggil untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran dan akan mendapatkan resi setelah itu kendaraan akan di cek ulang kepemilikannya di loket progresif, kemudian wajib pajak akan menunggu sampai proses selesai dan di panggil untuk pengambilan STNK/SKPD di loket pengesahan dan penyerahan STNK/SKPD.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

a. Hal- hal pendorong dalam Prosedur Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
   1. Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah yang telah di tetapkan akan pentingnya membayar pajak terkhusus nya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   2. Adanya fasilitas yang disediakan oleh kantor samsat
   3. Kualitas pelayanan yang bagus
b. Hal-hal penghambat dalam prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Dumai sebagai berikut :

1. Tidak lengkap nya berkas- berkas persyaratan yang dibawa oleh wajib pajak
2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap pemungutan pajak salah satunya dalam hal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Terkadang terjadi kerusakan pada alat penunjang sarana dan prasarana
4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang mungkin dapat memberikan masukan untuk untuk instansi perpajakan, antara lain:

1. Agar dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui media cetak dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan terutama mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan kinerja aparatur pajak dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak.

   Sebaiknya dilakukan pengecekan secara rutin terhadap alat penunjang sarana dan prasarana agar pelayanan menjadi lebih baik
3. Diharapkan kedepannya meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable yang diperoleh yang dapat mempengaruhi potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Afika, S. (2013). *Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Aswandi, A. (2021). *Mekanisme Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Plat Hitam) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Di Kota Mataram)*. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Selembar

Peraturan Gubernur Riau No. 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pasal 10 ayat 1&2

Resmi Siti. 2014. *Perpajakan*: *Teori* dan *Kasus*. Jakarta : Salemba 4

Siahaan, Marihot P. 2008. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Widanarko, A. (2010). Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi Pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informasi :

Jabatan/ Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

1. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan bea balik nama dikantor UPT?
2. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi dalam pengurusan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dikantor UPT kota Dumai?
3. Berapa biaya/tarif yang perlu dikeluarkan wajib pajak dalam membayar pajak bea balik nama kendaraan bermotor?
4. Apa dasar hukum yang digunakan kantor UPT yang digunakan dalam membayar pajak bea balik nama?
5. Apa saja sarana, prasarana/ fasilitas yang diberikan dikantor UPT ini pak? (baik itu untuk perangkat kerja maupun fasilitas untuk masyarakat)?
6. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (faktor sarana atau fasilitas dan faktor penegak hukumnya)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DATA YANG AKAN DIMINTA

1. Sejarah berdirinya kantor samsat/UPT
2. Visi dan misi kantor samsat/UPT kota dumai
3. Struktur organisasi dan mekanisme kerja dikantor samsat/UPT kota dumai
4. Loket pelayanan pada kantor samsat kota dumai
5. Pelayanan BBNKB (alur prosedur pelayanan BBNKB)
6. Persyaratan administratif(misalnya indentitas nya)
7. Subjek dan objek bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor UPT kota Dumai
8. Jumlah penerimaan BBNKB dan PKB pada kantor UPT kota dumai
   - Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019,2020,2021 (BBNKB 1&2, target, realisasi)
   - BBNKB 1 (jenis kendaraan bermotor, jumlah, NJKB,bobot, tarif, total)
   - BBNKB II (jenis kendaraan bermotor, jumlah, NJKB, bobot, tarif, total)
   - Wajib pajak (WP) yang telah melakukan BBNKB ditahun 2019,2020,2021 (nama, jenis kendaraan, BBNKB II, pendaftaran BBNKB, keterangan)
   -
9. Faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan BBNKB pada kantor UPT dikota Dumai
10. Sampel bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor samsat kota Dumai (sebelum balik nama dan sesudah balik nama)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1347/2022 Pekanbaru, 23 Februari 2022 M
Sifat : Biasa 21 Rajab 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Ari Nurwahidah, SE, MM**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	: Nisha Wulandari
NIM	: 01970623400
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) di Kantor Samsat Kota Dumai".** Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1348/2022 Pekanbaru, 23 Februari 2022 M
Sifat : Biasa 21 Rajab 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama	: Nisha Wulandari
NIM.	: 01970623400
Jurusan	: D III Perpajakan
Semester	: V (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) di Kantor Samsat Kota Dumai"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI
Jl.Sultan Syarif Qasim No.260, Telp.(0765) 31182 - 31575
Email : upt.dumai@yahoo.co.id – uptdumai.dipenda@riau.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423/BAPENDA/UPT.04/175

Yang bertanda di bawah ini.

Nama	: NISHA WULANDARI
NIM	: 01970623400
Jurusan	: ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Sekolah	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL.

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk keperluan penyusunan SKRIPSI di UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 24 April 2022
KEPALA UPT.PENGELOLAAN PENDAPATAN
KOTA DUMAI

RUDI, SE.M.IP
PENATA TK.I NIP. 19810415 200604 1 012

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45587

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1348/2022 Tanggal 23 Februari 2002**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**NISHA WULANDARI**
2. NIM / KTP	:	01970623400
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
4. Jenjang	:	DIII
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BNKB) DI KANTOR SAMSAT KOTA DUMAI**
7. Lokasi Penelitian	:	KANTOR SAMSAT KOTA DUMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
3. Walikota Dumai
   Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Nisha Wulandari lahir di Kota Dumai, 06 April 2001, yang merupakan anak satu – satunya yang dilahirkan dari pasangan Bapak Muhammad Nawaf dan Ibu Suji Hartini. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari SDN 021 Kota Dumai (2007-2013), SMPN 014 Dumai, (2013-2016), MAN 1 Kota Dumai (2016-2019). Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Gubernur Provinsi Riau (Juli-September 2021). untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul " **Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Samsat Kota Dumai**" .

Pengalaman organisasi yang penulis lakukan selama duduk di bangku perkuliahan selama 3 tahun bermula dari Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perpajakan selama 2 tahun ini. Banyak yang berkesan dalam mengikuti dan bergabung di setiap Organisasi dan banyak kegiatan-kegiatan yang menarik yang dapat menambah ilmu dan relasi